

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Ni Ade Sriarnita Febriana, 2023. **Analisis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai Alat Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada Kantor Camat Kubu).**

Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada tingkat kecamatan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur pemerintah yang menggunakan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD pada Kantor Camat Kubu mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, mempercepat proses pelaporan, serta memperkuat sistem pengawasan internal. Selain itu, penerapan SIPD juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, penelitian tersebut juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi SIPD, seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, serta masih adanya kesulitan adaptasi terhadap sistem baru. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan

kapasitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur teknologi untuk mengoptimalkan implementasi SIPD

2. Usep Saepul Hayat, 2023. **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Upaya Mencegah Terjadinya Fraud** Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pencegahan fraud pada instansi pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi terhadap aparatur pemerintah daerah yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah membantu meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga mampu memperkecil peluang terjadinya penyimpangan atau fraud. Selain itu, penggunaan SIPD juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah karena seluruh proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dalam satu sistem. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, jaringan internet yang belum stabil, serta masih adanya adaptasi pengguna terhadap sistem baru. Oleh karena itu, diperlukan

peningkatan pelatihan teknis serta dukungan infrastruktur agar implementasi SIPD dapat berjalan lebih optimal.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Kebijakan Publik

#### a. Defenisi Kebijakan Publik

Menurut KBBI, publik adalah: orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya).

(Agustino 2022:6) mengatakan bahwa:

“Dalam percakapan sehari-hari kata 'publik' mempunyai dua arti yang berbeda. Pertama, *public* diartikan sebagai negara atau pemerintah seperti dalam terjemahan *public administration* menjadi administrasi negara. Kedua, kata publik sebagai padanan dari kata 'umum' seperti dalam *public telephone* (telepon umum), *public transportation* (transportasi umum), atau *public interest* (kepentingan umum). Menurut asal katanya (secara etimologis), istilah publik merupakan serapan dari bahasa Inggris *public*, yang juga memiliki dua makna atau bentuk. Pertama, sebagai kata benda (*the public*) yang berarti *the community in general* atau *part of community having a particular interest in common*. Kedua, sebagai kata sifat (*public*) yang dapat berarti: *of or concerning people in general* atau *provided, especially by central or local government, for the use of people in general* atau *of or engaged in affairs, entertainment, service, etc. of the people* atau *open or known to people in general*.

Dari pengertian ini, kata 'publik' dalam bahasa Inggris sangat erat kaitannya dengan segala sesuatu yang menyangkut masyarakat atau orang banyak. Sementara itu, dilihat dari aspek sejarah perkembangannya, pengertian kata *public* muncul dari dua sumber. Pertama, berasal dari bahasa Yunani, *pubes*, yang berarti kedewasaan, baik kedewasaan fisik, emosional, maupun intelektual. Dalam khazanah sosiologi dan psikologi, *pubes* kemudian diistilahkan menjadi *puber*—dimengerti sebagai suatu tahapan kehidupan sosial seorang manusia, yaitu masa transisi yang ditandai dengan adanya perubahan seorang individu dari yang awalnya mementingkan diri sendiri (*self-centered individuals*) ke arah usaha memandang dan memperhitungkan orang-orang di luar dirinya. Dalam masa ini, seorang individu mulai berminat

untuk mengerti kehidupan orang lain atau memahami akibat-akibat dari berbagai tindakan yang dilakukannya (terhadap orang lain atau sebaliknya). Kedua, kata *public* yang juga berasal dari Yunani, *koinon*, yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi *common* yang menekankan tentang pentingnya suatu hubungan (*relationship*) antar individu.

Merujuk pengertian tersebut di atas, kata publik pertama-tama dapat dimengerti sebagai benda (*things*) apabila hal tersebut menyangkut suatu keputusan publik. Dan kedua, kata publik dapat berarti suatu kemampuan (*capacity*) apabila hal tersebut menyangkut kemampuan untuk berfungsi secara publik, yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dan kemampuan untuk mengerti hubungan antara tindakan-tindakan seorang individu dengan akibat yang ditimbulkannya bagi orang lain secara komprehensif”.

Sedangkan kebijakan publik menurut KBBI adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat publik yang ditujukan kepada masyarakat luas. Dan menurut Agustino (2022:14) mengatakan bahwa:

“Definisi lain menjelaskan bahwa kebijakan publik: "... *what governments do, why they do it, and what difference it makes*" (Dye 1992: 2). Merujuk definisi tersebut dapatlah disimpulkan kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumber daya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*). Bahkan dalam sudut pandang lain, Dye (1992: 2) menulis pula kebijakan publik sebagai: "*Anything a government chooses to do or not to do.*" Menurut takrif ini, semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan publik”.

#### b. Proses dan Tahapan Kebijakan Publik

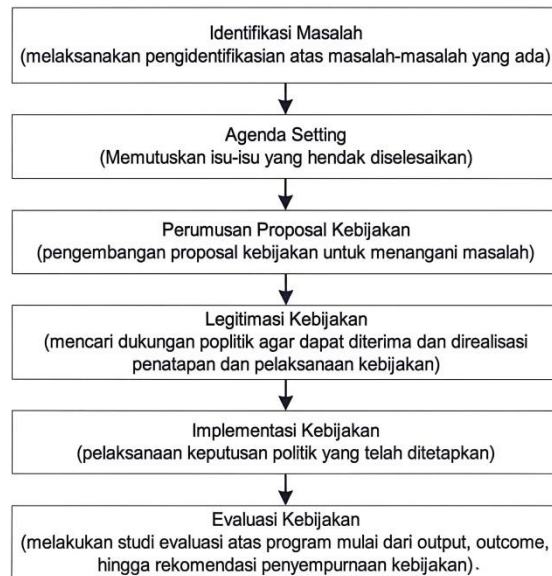
Salah satu model proses dan tahapan kebijakan publik adalah model proses. Menurut (Agustino 2022:107) mengatakan bahwa:

“Dalam model pendekatan ini, kebijakan publik dimaknai sebagai suatu aktivitas yang menyertakan rangkaian-rangkaian kegiatan (yang berproses) yang berujung evaluasi

kebijakan publik. Secara singkat model ini hendak menyatakan bahwa dalam memformulasi kebijakan ada standar-standar yang seharusnya dilakukan oleh para aktor kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan minimal sesuai dengan apa yang hendak dicapai”.

**Gambar 2.1**

**Formulasi Kebijakan Model Proses**



*Sumber: Buku Dasar-dasar Kebijakan Publik Agustino (2022)*

Di dalam model proses, proses dan tahapan kebijakan public terbagi menjadi enam tahap, yakni:

1) Identifikasi masalah

Melaksanakan pengidentifikasian atas masalah-masalah yang ada.

2) *Agenda setting*

Memutuskan isu-isu yang hendak diselesaikan

3) Perumusan proposal kebijakan

Pengembangan proposal kebijakan untuk menangani masalah.

4) Legitimasi kebijakan

Mencari dukungan politik agar dapat diterima dan direalisasi penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

5) Implementasi kebijakan

Pelaksanaan keputusan politik yang telah ditetapkan.

6) Evaluasi kebijakan

Melakukan studi evaluasi atas program mulai dari *output*, *outcome*, hingga rekomendasi penyempurnaan kebijakan.

c. Model Kebijakan Publik

Thomas R. Dye dalam (Awan Y. Abdullah dan Yudi Rusfiana, 2016:50), mengemukakan 6 (Enam) model perumusan kebijakan publik, yaitu:

1) Model Kelembagaan (*Istitutional model*)

Model kelembagaan biasanya digunakan untuk menelaah proses perumusan kebijakan, yakni digunakan untuk menjelaskan keadaan lembaga pemerintah dan digunakan untuk menganalisis mengapa persoalan yang sama kadangkala diorganisasikan dan diatur oleh beberapa lembaga.

2) Model Kelompok

Model kelompok pada dasarnya berangkat dari suatu anggapan bahwa interaksi antar kelompok dalam masyarakat adalah merupakan pusat perhatian politik.

3) Model Elite

Model perumusan kebijakan ini beranggapan bahwa kebijakan publik dipandang sebagai preferensi (kehendak) dan nilai-nilai yang dianut oleh elite yang berkuasa (kelas yang pertama).

4) Model Rasional

Model perumusan kebijakan ini beranggapan bahwa kebijakan dipandang sebagai pencapaian tujuan secara efisien. Model rasional ini juga disebut model rasional komprehensif atau model sinoptik.

5) Model Inkremental

Model perumusan kebijakan ini memandang kebijakan sebagai variasi dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, atau kebijakan-kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah di masa lampau, dengan hanya melakukan perubahan seperlunya (tambal sulam).

6) Model Sistem

Model perumusan kebijakan ini memandang kebijakan sebagai *output* dari sistem. Oleh karena itu model ini disebut pula sebagai "Model Easton" atau "Eastonian Model" (dipelopori oleh David Easton).

Keenam model perumusan kebijakan publik tersebut masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam tahap kebijakan publik, implementasi kebijakan sering dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, terkadang tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi kenyataannya, implementasi dalam tahap kebijakan publik ini menjadi begitu penting karena suatu kebijakan dapat tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain tahapan implementasi merupakan tahap yang dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Menurut Leo Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2017:126) bahwa Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Grindle dalam Novita Tresiana (2017:46) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses Implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah

ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Definisi lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Leo Agustino, 2022:146) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai "Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, dapat pola berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya".

Menurut Deddy Mulyadi (2016:56) Implementasi kebijakan merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. (Leo Agustino, 2022:146)

Untuk mengenal substansi dari implementasi kebijakan, disajikan beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan para pakar dan pemerhati kebijakan publik yang akan dijelaskan dalam subbab di bawah ini.

#### a. Model Van Metter dan Van Horn

Model Pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn di sebut dengan istilah *A Model Of The Policy Implementation* dalam (Leo Agustino, 2017:133) dikatakan bahwa:

“Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung

dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan publik berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik”.

Ada enam variabel, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik menurut Van Metter & Van Horn dalam (Leo Agustino, 2017:133).

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik

yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

b. Model Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier

Model implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier disebut *A Framework For Policy Implementation Analysis*. Menurut kedua ahli ini tentang kebijakan ini berpendapat bahwa dalam (Siti Marwiyah, 2022:41).

Peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga katagori besar yang akan dijelaskan yaitu:

- 1) Mudah atau tidaknya masalah kebijakan publik yang akan dibuat
- 2) Peningkatan dan ruang lingkup perubahan perilaku yang akan dikehendaki
- 3) Kemampuan kebijakan secara terstruktur perlu proses implementasi secara tepat
- 4) Variabel-variabel yang di luar undang-undang yang mempengaruhi impementasi

c. Model George C. Edward III

Teori dari George C. Edward III menyebutkan model implementasi kebijakan publiknya yaitu “implementasi langsung dan tidak langsung”. Ada empat variabel yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu kebijakan dalam (Leo Agustino, 2022:154).

- 1) Komunikasi  
Komunikasi merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan dalam implementasi kebijakan publik yang efektif. Dalam hal ini, keputusan dan peraturan harus dikomunikasikan dengan baik kepada semua pelaksana yang terlibat agar mereka mengetahui apa yang harus dilaksanakan. Ada dua indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
- 2) Sumber daya  
Sumber daya merupakan variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III untuk menerapkan suatu kebijakan, indikator sumber daya terdiri dari beberapa indikator, seperti staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.
- 3) Disposisi  
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Sikap implementor kebijakan menjadi faktor penting dalam pendekatan implementasi kebijakan publik yang efektif. Implementor kebijakan tidak hanya perlu mengetahui apa yang harus dilaksanakan, namun harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Variabel disposisi

memiliki dua hal yang harus diperhatikan, yaitu pengangkatan birokrat dan insentif.

4) Struktur birokrasi

Menurut Edward III, variabel keempat yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber daya untuk melakukan kebijakan tersedia, atau implementor kebijakan tahu apa yang harus dilaksanakan dan ingin melaksanakannya, kebijakan tersebut mungkin tidak terealisasi jika ada kekurangan pada struktur birokrasi.

d. Model Hogwood & Gunn

Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn menegaskan model ini ada beberapa syarat yang dibutuhkan untuk melakukan implementasi kebijakan dalam (Reno Affrian, 2023:40).

- 1) Berkaitan dengan jaminan bahwa lembaga/badan pelaksana tidak akan mengalami masalah yang besar akibat kondisi eksternal yang dihadapi.
- 2) Apakah tersedia cukup waktu dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakannya?
- 3) Apakah perpaduan sumber daya yang dibutuhkan benar-benar tersedia?
- 4) Apakah kebijakan yang akan dilaksanakan didasarkan pada hubungan kasual yang andal?
- 5) Seberapa banyak hubungan sebab-akibat yang terjadi dengan asumsi bahwa semakin sedikit hubungan tersebut, semakin tinggi juga hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut dapat dicapai.
- 6) Apakah ada hubungan ketergantungan kecil antara pihak-pihak yang terlibat?
- 7) Memiliki pemahaman yang mendalam dan kesepakatan tentang tujuan yang ingin dicapai.
- 8) Tiap-tiap tugas sudah diuraikan secara rinci dan diletakkan dalam urutan yang benar.
- 9) Memiliki komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10) Tiap-tiap pihak yang mempunyai wewenang kekuasaan bisa menuntut dan memperoleh kepatuhan yang sempurna.

e. Model Charles O. Jones

Jones dalam (Arifin Tahir, 2020:28) mengatakan bahwa:

Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Tiga aktivitas tersebut adalah :

- 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
- 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

### 3. E-Government

E-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas pemerintahan. World Bank mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Implementasi e-government proses penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Implementasi ini melibatkan perubahan sistem kerja, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur teknologi, serta penyesuaian regulasi yang mendukung transparansi digital pemerintahan.

Menurut kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government dalam (Indrajit, 2016:11) keberhasilan implementasi e-

government ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu *Support*, *Capacity* dan *Value*.

**a. *Support* atau Dukungan**

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-Government, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e-Government. Tanpa adanya unsur political will ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-Government dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen top down, maka jelas dukungan implementasi program e-Government yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembatunya Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). komitmen dari pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis teknologi informasi. Dukungan tersebut meliputi dukungan kebijakan, dukungan anggaran, serta dukungan dari pimpinan organisasi. Tanpa adanya dukungan yang kuat dari pimpinan, implementasi sistem berbasis digital sulit untuk berjalan secara optimal.

**b. *Capacity* atau Kapasitas**

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-Government terkait mena jdi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- 1) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagi inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;
- 2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-Government; dan
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan e-Government, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di luar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah.

### c. *Value* atau Manfaat

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif e-Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep e-Government.

Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan e-Government yang akan merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep e-Government berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk *nexus*) tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi.

## 4. Sistem Informasi

Sistem informasi menurut Gordon B. Davis dalam (Alfani & Nasution, 2022) adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Definisi Sistem Informasi Pemerintah secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksanaannya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi.

Menurut John F. Nash dan Martin B. Roberts dalam (Fauzi, 2017) Suatu sistem informasi adalah suatu kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian

yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan sesuatu dasar untuk pengambilan keputusan.

Sistem informasi memiliki karakteristik umum, yaitu berkembang sepanjang masa, mempunyai jaringan informasi, melaksanakan tugas-tugas yang perlu sehubungan dengan data, menyediakan informasi kepada berbagai pihak di dalam maupun luar perusahaan. Adapun tujuan dari sistem informasi adalah:

- a. Menyajikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan
- b. Menyajikan informasi guna mendukung operasi perusahaan harian
- c. Menyajikan informasi yang berkenan dengan kepengurusan

Namun tidak semua data dapat diolah menjadi informasi, terdapat beberapa kriteria agar data-data yang diolah dapat memberikan informasi yang berkualitas dan berarti, Kriteria tersebut yaitu :

- a. Relevan

Isi sebuah laporan atau dokumen harus melayani suatu tujuan, sehingga laporan itu dapat mendukung keputusan manajer atau petugas administrasi.

- b. Tepat Waktu

Suatu informasi yang dihasilkan tidak boleh *out of date* dari priode waktu tindakan yang didukungnya.

c. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan yang sifatnya material, informasi harus akurat dan sempurna.

d. Lengkap

Dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas tidak boleh ada informasi yang hilang.

e. Rangkuman

Informasi harus diintegrasikan agar sesuai dengan kebutuhan pemakai.

## 5. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70, Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Ruang lingkup SIPD meliputi, informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya.

Sistem informasi SIPD dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah. Selain itu, fungsi SIPD sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah, mengevaluasi program-program pembangunan, dan sekaligus mengevaluasi capaian-capaian pembangunan.

SIPD memegang peran penting dalam mendukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang mutakhir, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, SIPD juga berperan dalam mendorong sinkronisasi data antara pusat dan daerah untuk mencapai single database nasional. Oleh karena itu, penggunaan SIPD harus dioptimalkan untuk mendukung tercapainya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah yang efektif dan efisien (Winarno, Kusnadi, & Afriliana, 2019). E-Database adalah aplikasi online yang digunakan untuk mendokumentasikan dan mengadministrasikan data dan informasi kondisi daerah. Tujuan diluncurkannya SIPD oleh Kemendagri adalah untuk memudahkan daerah dalam melakukan perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dan seragam di seluruh daerah (Ekaputra, 2021).

Untuk mencapai *Good Governance* dan menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat, sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu secara Nasional. Untuk itu, diterbitkanlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

- a. Informasi Pembangunan Daerah. SIPD memiliki kemampuan untuk mengelola data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan banyak elemen. Dengan

menggunakan SIPD, dapat memudahkan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD, dan RENJA-PD serta memberikan profil dan analisis tentang pelaksanaan pembangunan daerah. Data dan informasi ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memperbarui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

- b. Informasi Keuangan Daerah. SIPD dapat mengelola data keuangan daerah dengan efektif dan efisien, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. SIPD mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah, seperti perencanaan keuangan daerah, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran daerah, akuntansi dan pelaporan anggaran daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah, pertanggungjawaban barang milik daerah, serta informasi keuangan daerah lainnya.
- c. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya. Selain itu, SIPD juga mampu memberikan informasi umum lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, seperti Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dalam satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.

## **6. Akuntabilitas keuangan**

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan

keuangan daerah secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018:20).

Akuntabilitas keuangan daerah dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan, penggunaan anggaran yang efektif, serta adanya pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Dengan adanya sistem informasi berbasis digital seperti SIPD, akuntabilitas keuangan daerah diharapkan dapat meningkat karena seluruh proses pengelolaan keuangan tercatat secara sistematis.

Akuntabilitas merupakan konsep fundamental dalam tata kelola organisasi yang mengacu pada kewajiban individu atau lembaga untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya kepada pihak-pihak yang berwenang. Dalam ranah akademik, akuntabilitas dipahami tidak sekadar sebagai pertanggungjawaban formal, melainkan juga sebagai mekanisme kontrol yang mencakup transparansi, integritas, dan responsivitas terhadap pemangku kepentingan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan publik dan organisasi sektor publik, akuntabilitas berkaitan erat dengan kualitas pelaporan dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dikelola, serta bagaimana lembaga tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun badan pengawas eksternal. Akuntabilitas

melibatkan kewajiban untuk menyusun laporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat sesuai standar yang berlaku.

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian khusus dari akuntabilitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan. Dalam pengertian akademik, akuntabilitas keuangan merujuk pada kewajiban suatu entitas terutama organisasi publik untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana publik melalui penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang akurat, transparan, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menghubungkan antara teori dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Manfaat dari kerangka berpikir yaitu membantu peneliti dalam menguji rumusan masalah, membantu memilih serta menemukan model yang cocok dalam penelitian. Pada dasarnya penguraian kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori implementasi e-government menurut Menurut kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government dalam (Indrajit, 2016:11) keberhasilan implementasi E-Government ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu (*Support*, *Capacity* dan *Value*). Sehingga dapat diketahui apakah kebijakan SIPD dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah atau tidak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran yang mana digambarkan dengan gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

